

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2005. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta. Hal. 1-2
- Amirudin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Asikin, Amiruddin Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Masruhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Hilal Pustaka: Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Mustafa, Bachsan. 2015. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Wibowo, Basuki Rekso. 2012. *Pembenahan Administrasi Peradilan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.

### B. Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

### **C. Web :**

CNN Indonesia. 2020. *Mahfud: RI Satu-satunya Negara Besar di Asia Tak Kena Corona*. 7 Februari 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207194915-20-472750/mahfud-ri-satu-satunya-negara-besar-di-asia-tak-kena-corona> .

Diakses pada tanggal 13 November 2020

Ihsanuddin. 2020. *Pernyataan Kontroversial Menkes Terawan di Awal Pandemi Covid-19*. 29 September 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16290701/pernyataan-kontroversial-menkes-terawan-di-awal-pandemi-covid-19?page=all> .

Diakses pada tanggal 13 November 2020

Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*.

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf).

Diakses pada tanggal 3 Desember 2012

Pramesti, Tri Jaya Ayu. 2015. *Perbedaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota*. 10 April 2015.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/> .

Diakses pada tanggal 7 Desember 2020

### **D. Jurnal :**

Agustino, Leo. 2020. *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia*. Jurnal Borneo Administrator, Volume 16 (2), 15 Agustus 2020.

Ansori, Lufil. 2017. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, Desember 2017.

Lathif, Nazaruddin. 2017. *Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*. Pakuan Law Review Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017.

Marbun, Rocky. 2014. *Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 3, Tahun 2014.

Sunarto. 2016. *Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif*. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 4, Oktober 2016.

**E. Wawancara :**

Bapak Sukahar Kusmen, Kasi Penegak Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kota Kediri, 3 Februari 2021

Bapak Muhlisiina Lahuddin, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri, tanggal 3 Februari 2021

Bapak Nurkhamid, Sekretaris Satpol PP Kota Kediri, 3 Februari 2021